

**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

YOVITA OWA

2018110085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA(SISKEUDES) TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA BATU Yovita Owa ¹, Risnaningsih², Hendrik Suhendrik ³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
E-mail : : ofyneowa@gmail.com

Anggaran yang dimiliki oleh sebuah desa dapat dikatakan sebagai salah satu APBN yang mana secara langsung diberikan oleh pihak pemerintah pusat terhadap pemerintah yang berada di desa. Sistem penerimaan anggaran desa yang jauh lebih meningkat akan dapat memberikan dampak atau resiko meningkat pula, oleh sebab itu anggaran yang dimiliki oleh desa secara langsung akan dapat diterima serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara efektif, sehingga pihak pemerintah secara langsung akan dituntut untuk dapat mempunyai akuntabilitas dalam mengetahui sebuah pengaruh sistem keuangan dana yang ada di desa terhadap akuntabilitas. Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui sebuah pengaruh sistem keuangan dana yang dimiliki oleh desa terhadap akuntabilitas. Metode yang akan digunakan dalam riset ini ialah deskriptif kuantitatif sebagaimana dengan berlandaskan pada data sekunder serta primer yang dilakukan dengan pengisian kuesioner. Jumlah populasi yang akan digunakan dalam riset ini berjumlah 12 Desa yang berada di Kota Batu, sedangkan jumlah responden yang akan digunakan dalam riset ini ialah 36 responden. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan analisis regresi linier berganda yang mana akan dibantu dengan menggunakan Software SPSS 26. Hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah keuangan desa (siskeudes) dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Batu.

Kata Kunci : Siskeudes, Akuntabilitas, Pengelolaan dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang dituangkan dalam UU Tahun 2004 No 6 yang berkaitan dengan peraturan desa yang mana akan dapat mengalami sebuah tindakan atas perubahan yang sangat signifikan. Dari aspek regulasi sama sekali bukan lagi dari bagian UU pada Tahun 2004 No 32 yang mana akan dapat bertentangan dengan pihak pemerintahan yang ada di sebuah daerah. Adanya UU yang berkaitan dengan desa maka secara langsung akan dapat melatarbelakangi dalam sebuah pertimbangan yang berkaitan dengan pengaturan desa selama dapat diberlakukan yang telah tidak akan dapat disesuaikan terkait dengan tingkat perkembangan pada kedudukan yang berada di lapisan masyarakat desa dan tingkat upaya untuk dapat mendongkrak adanya perkembangan anggaran dalam melaksanakan sebuah sistem pembangunan.

Selain dalam UU yang berkaitan dengan desa dapat dikatakan sebagai salah satu sistem pengawasan pada sebuah desa yang mana mempunyai sebuah hak yang bersumber serta hak yang secara tradisional untuk dapat dilakukan untuk dapat mengatur sebuah kepentingan lapisan masyarakat. Oleh sebab itu secara langsung akan dapat memberikan sebuah kesepakatan pada desa untuk dapat mengelola yang mandiri anggaran desa serta dapat pula akan dapat mengembangkan hasil yang akan dapat dipergunakan untuk dapat memaksimalkan taraf hidup pada lapisan masyarakat. Sistem pengelolaan desa secara langsung akan tidak dapat terlepas dari sistem akuntabilitas. Akuntabilitas yang dibangun dalam ruang lingkup pemerintahan jauh lebih terpenting.

Akuntabilitas merupakan salah satu hal jauh lebih terpenting yang akan dapat dimiliki oleh aspek entitas usaha serta pihak pemerintah dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pihak shareholders (Anto, H. M., et al, 2021). Lapisan pemerintah

dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi yang mana memiliki tugas serta tanggung jawab untuk dapat dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya di rektor privat akuntabilitas akan ada dalam bentuk otomatis apabila sudah dapat melaksanakan sebuah tingkat atas penerbit pada pasar modal serta tingkat entitas terhadap kapasitas sebagai salah satu fudasi dalam sebuah lapisan masyarakat Widyatama et al (2017). Adapun sebuah perbedaan akuntabilitas serta privat yang mana dapat dikatakan sebagai hal yang akan dapat digunakan. Salah satu akuntabilitas yang berada pada lapisan pemerintah yang akan dapat dinilai jauh lebih terpenting sehingga dapat disebabkan sebuah akuntabilitas yang ada serta dapat pula akan dapat memaksimalkan pada tingkat kepercayaan.

Anggaran desa merupakan sebuah anggaran yang secara langsung akan dapat diberikan oleh pihak pemerintah yang akan bersumber dari APBN yang mana akan dapat bertujuan untuk dapat memperhitungkan anggaran yang ada pada desa. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berkaitan dengan sistem pemerintahan desa yang dapat mengalokasikan anggaran yang akan dapat melalui sebuah aspek transfer terhadap Kota. Sebagaimana anggaran yang ada maka pada setiap saat Kota dapat untuk mengalokasikan terhadap desa yang akan berlandaskan pada pada jumlah desa yang mana akan dapat juga memperkuat pada sisi penduduk yang akan mencapai 30% serta jumlah terhadap luas wilayah 20%, 50% kemiskinan. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara langsung akan dapat diterima oleh pihak desa untuk dapat menyebabkan sebuah penerimaan akan dapat meningkat. Dalam penerimaan anggaran desa yang mana akan dapat memaksimalkan ini yang mana tentunya sangat dibutuhkan pada sebuah laporan finansial yang mana akan dapat memberikan pertanggung jawaban pada desa (Permendagri Nomor 113, 2014). Permendagri Nomor 113 (2014) yang mana akan dapat berkaitan dengan sistem pengelolaan finansial desa untuk dapat memberikan sebuah tindakan penyempurnaan terhadap sebuah Pemendagri tahun 2017 No 37 yang berkaitan dengan PPKD.

Pada dasarnya sistem akuntansi akan dapat direncanakan serta dapat pula dilaksanakan secara efektif. Sistem akuntansi yang akan dikembangkan pada sebuah kelompok atau organisasi mempunyai sebuah tujuan untuk dapat mencari data yang jauh lebih efektif (Indralesmana & Suaryana, 2014). Hal tersebut akan dapat direncanakan berlandaskan pada SIAK. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Julianto & Dewi, 2019) yang mengatakan bahwa SKD dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam mengelola anggaran desa. Sebuah aplikasi SISKEUDES dapat dikatakan sebagai salah satu Kemndagri yang akan diberikan sebuah kerja sama terhadap BPKP untuk dapat mempermudah dalam melaksanakan pencatatan sebuah laporan finansial.

Dalam melaksanakan SISKEUDES yang mana dapat memberikan sebuah himbauan KPK sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah surat pada Tahun 2016 No 7508/01-16/08/2016 terhadap semua pimpinan desa dalam hal ini kepala desa yang berada di NKRI untuk itu secara langsung akan dapat menggunakan SISKEUDES sebagaimana dalam melaksanakan sebuah sistem pengelolaan finansial desa. SISKEUDES secara langsung akan dapat menghasilkan RPJM, RKP serta APB. (Mahayani, 2017) menyatakan bahwa salah satu akuntabilitas tidak saja akan sekedar dapat melakukan sebuah tanggung jawab finansial yang secara formal terhadap sebuah prinsip akan dapat bertanggung jawab yang dapat dikelompokkan dalam beberapa hal misalnya pihak pemerintah, masyarakat serta lingkungan organisasi.

Adapun salah satu tuntutan yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam mengelola keuangan yang dimiliki oleh desa akan dijadikan sebagai salah satu perhatian yang secara khusus terhadap semua perangkat yang berada di dalam desa, disebabkan karena sistem akuntabilitas secara langsung akan dapat mendorong pada tingkat kesuksesan yang akan dicapai oleh salah satu visi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang desa ialah dapat dilaksanakan desa yang mandiri serta maju. Dalam melakukan sebuah tindakan atas tanggung jawab yang akan diinterpretasikan dalam salah satu jenis laporan finansial yang akan dapat

dihasilkan berlandaskan pada mekanisme akuntansi yang tak terlepas dari akuntabilitas serta tingkat keterbukaan anggaran desa. (Gayatri et al., 2017) menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sebuah finansial pada sebuah desa yang tak terlepas dari akuntabilitas yang mana akan dapat terwujudnya sistem pengelolaan sebuah laporan finansial yang jauh lebih efisien. Pihak pemerintah akan dapat berperan sebagai salah satu pengelolaan finansial yang mana tak terlepas dari penyajian data atau informasi finansial serta dapat pula memberikan sebuah pelayanan dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap tingkat perekonomian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Fajri et al., 2015) menyatakan bahwa dalam melakukan sebuah kegiatan dalam untuk menghasilkan tingkat keahlian bahkan dapat pula untuk bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan anggaran yang ada di desa.

Dilansir dari (Kompas.com, 2021) sebagaimana yang diungkapkan oleh ICW bahwa pihak pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mengontrol terhadap penggunaan anggaran yang dimiliki oleh pedesaan. Hal tersebut dapat pula disampaikan berlandaskan pada salah satu fenomena korupsi sebagaimana dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini pejabat. Pada tahun 2015 – 2020 ditemukan kasus fraud yang mana dapat terjerat kasus pada lapisan perangkat desa. Kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp 111 miliar. Dari angka tersebut terletak pada bagian kedua (2) di tahun 2020, sebagaimana telah dilakukan salah satu praktek korupsi sebagaimana dapat dilakukan para klaster berpolitik diantaranya pimpinan daerah serta para anggota ;legislatif yang mencapai Rp 115 miliar.

Sebagaimana dalam sebuah riset yang dilakukan pada sebuah desa Kota Batu. Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji yang terdiri dari 12 Desa diantaranya Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa Gunungsari, Desa Tulungrejo, Desa Pandanrejo, dan Desa Sumberbrantas. Maraknya kasus korupsi dana desa yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam memberantas kasus korupsi dana desa. Beberapa

waktu lalu pimpinan desa dalam hal ini kepala desa yang berada di Kabupaten Malang dapat melakukan tingkat kejahatan terkait anggaran sebesar Rp 240 Juta. Menurut Agus, Hudi selaku kepala desa yang dikatakan sebagai salah satu tindakan yang sama sekali tidak terpuji yang mana seharusnya dilakukan pemeriksaan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang (detikNews,2021).

Terbaru kasus kaur keuangan serta salah seorang bendahara di Kota Batu, Kecamatan Bumiaji Desa Desa Bulukerto dilakukan proses pemeriksaan sampai ditahan pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana dengan penyalahgunaan anggaran yang dimiliki oleh negara mencapai Rp 338 Juta. Pimpinan kejaksaan yang berada di Kota Batu menyatakan bahwa tersangka sekaligus akan ditahan serta dapat diproses berlandaskan pada aturan yang berlaku, karena finansial yang ada digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan secara pribadi. Problem inilah secara terus menerus akan bergulir sampai dengan tahun 2021 tepat pada bulan Januari, serta para pihak saksi akan melaksanakan tindakan pengumpulan informasi terkait dengan fenomena yang terjadi. (Jatimnow.com, 2021) menyatakan bahwa kejadian hukumnya akan berikan terhadap pihak yang berkepentingan untuk diproses pada jalur hukum pidana. Hal tersebut sama sekali tidak terlepas dari salah sebuah pengetahuan seorang leader yang ada, serta pada prinsip seorang pimpinan yang berada di desa sebagaimana mempunyai tingkat atas kewenangan dalam memahami terkait dengan birokrasi pada wilayahnya sendiri.

Penelitian ini masih menarik diteliti karena ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang hasilnya inkonsisten. Dari kasus yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pada Desa yang ada di Kota Batu. Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik **“PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA BATU”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat dalam riset ini ialah : Apakah Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat dalam riset ini ialah : Apakah Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat dalam riset ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Pada dasarnya dalam kajian teoritis salah satu manfaat riset ini ialah agar dapat dijadikan bahan *literature* untuk menunjang pemahaman terhadap peneliti yang mana akan dapat berkaitan dengan Akuntansi.

2. Manfaat Praktisi

a) Manfaat bagi akademisi

Bagi akademisi, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman sebagaimana dapat berguna terhadap pembaca serta bahan referensi berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa.

b) Manfaat bagi Perangkat Desa

Bagi perangkat desa, hasil dari riset ini juga akan selalu diharapkan untuk memberikan kontribusi serta menambah manfaat bagi para pengambil kebijakan di pemerintahan desa yang ada di Kota Batu dan dapat menambah informasi aktual yang terkait dengan Sistem Keuangan Desa.

c) Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi Akuntansi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. (2019). *The Determinant Accountability Of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District)*. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 4, No 2 (2019), 118–135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- Anto, H. M., Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI KEAGAMAAN PADA GEREJA GPDI GLORIA MALANG. *Cakrawala Jurnal Penelitian sosial*, 10(1), 21-38.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Arikanto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi, jakarta :Edisi Revisi
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Abdullah, Samad Dan Abjan. 2019. 'No Title'. *IJIS (Indonesian Journal on Information System)* 4(1):13-24. e-ISSN 2548-6438. p-ISSN 2614-7173.
- Amalya, dkk. 2017. 'Kinerja Keuangan Dan Tingkat Pengembalian Saham: Studi Pada Perusahaan Asuransi Di Bursa Efek Indonesia'. *Bisnis Dan Manajemen* 7(1):P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182 Halaman 1-14.
- DeLone, W., and M. E. . (1992). Information System Success: The Quest For The Dependent Variabel. *Information System Research*.
- detikNews. (2021). *Korupsi Dana Desa Rp 240 Juta, Kades Di Malang Ditahan*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5823991/korupsi-dana-desa-rp-240-juta-kades-di-malang-ditahan>
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 175–182. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Hendaris & Siraz. 2020. 'Analysis of Factors Influencing The Accountability of Village Funds Management'. *Dinasti Publisher* 1(3).
- Imam Ghozali, (2011: 110), 2015. 'Imam Ghozali (2011: 105-106) Uji', 43-56
- Indralesmana, K. W., & Suaryana, I. G. . A. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Usaha Kecil dan Menengah Di Nusa Penida. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 14–26.
- jatimnow.com. (2021). *Rugikan Negara Rp 338 Juta, Perangkat Desa Di Kota Batu Ditahan Kejaksaaan*. Jatimnow.Com. <https://jatimnow.com/baca-34641-rugikan-negara-rp-338-juta-perangkat-desa-di-kota-batu-ditahan-kejaksaaan>
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan Ke 1: Pebruari 2022. Malang,

Jatim : Penerbit Peneleh.

- Kartika, D., Krisdiyawati, & Azarine Sava Vania Slamet. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Krasak. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(1), 23–38. <https://doi.org/10.31605/jepa.v4i1.1164>
- Kompas.com. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>
- Lusiono Dan Suharman. 2017. ‘ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SISKEUDES DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS’. *Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5(2).
- Mahayani. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12 (2), 129–144.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern :Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. Vol 2, No.
- Martono, H. A. dan. (2014). *Manajemen Keuangan* (Edisi-2 Ce). Yogyakarta: EKO-NISIA.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1–20.
- Murungi & Kayigamba. 2015. ‘The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda’. *Of Emerging Trends in Economics and Management Sciences* 64:JETEMS 64:261-265.
- Permendagri Nomor 113. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Putra, dkk. 2016. ‘Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan Sebagai Variabel Pemoderasi’. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(1):ISSN 2302-8556.
- Riseh tunong. (2018). *Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0*. Risehtunong.Blogspot.Com. <https://risehtunong.blogspot.com/2018/12/keunggulan-dan-kelebihan-aplikasi.html>
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2013 - *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 1–20.
- Sari, N., & Andra Asmara, J. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 1.
- Siagian, M. A. (2011). *Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Komponen*.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju*

- Sustainable Business Practice*, 3, 580–590.
- Sugioyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugioyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarti & Yudianto. 2017. 'Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya Dan Keca'. *PROCEEDINGS* 1-590. ISSN-2252–3936.
- Triyono dkk. 2019. 'Pengaruh Praktik Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia)'. *University Research Colloquium* ISSN 2407-9189.
- Undang-Undang Nomor 22. (2004). *Komisi Yudisial*.
- Undang-Undang Nomor 6. (2014). *Desa*.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112